

Kepentingan Tiongkok Dibalik Dukungannya terhadap Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM)

Oktaviantin Sekar Dewita

ABSTRAK

Penelitian ini berusaha menelaah kepentingan Tiongkok dalam mendukung multilateralisasi Chiang Mai Initiative (CMI) menjadi Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM). Pada tahun 2000, Tiongkok mulai secara pro aktif mendukung terbentuknya kerjasama finansial yang lebih terintegrasi secara multilateral, sehingga terbentuklah Chiang Mai Initiative Multilateralism pada Maret 2010. Melalui kerangka berpikir Regionalisme, Integrasi Ekonomi, dan Kepentingan Nasional, penelitian ini akan menjelaskan kepentingan Tiongkok dibalik dukungannya terhadap terbentuknya CMIM. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian eksplanatif ini mendukung hipotesis bahwa Tiongkok mendukung terbentuknya kerjasama finansial kawasan CMIM sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui terciptanya stabilitas finansial kawasan Asia Timur-Tenggara.

Kata Kunci: *Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM), kawasan Asia Timur-Tenggara.*

This research try to examines the interest of China in supporting multilateralism of Chiang Mai Initiative (CMI) to Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM). In 2000, China began pro active in supporting the formation of multilateral integrated financial cooperation, thus result in Chiang Mai Initiative Multilateralism.on March 2010. Through the frame of regionalism, economic integration, and the national interest, this research will explain the importance of China reversed its support to the formation of the CMIM. The conclusions obtained in this explanation research supports the hypothesis that China supports the establishment of financial co-operation CMIM to achieve economic prosperity through the creation of the financial stability of the Asian region East-Southeast.

Keywords: *Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM), East-Southeast Asia region.*

Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM) merupakan sebuah dana moneter Asia yang mulai berlaku sejak hari Rabu 24 Maret 2010. Perjanjian ini sebelumnya telah ditandatangani oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan serta Otoritas Moneter Hong Kong Tiongkok, pada akhir Desember 2009. CMIM merupakan fasilitas bantuan keuangan dengan jumlah dana sebesar USD 120 milyar yang bertujuan untuk menanggulangi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas jangka pendek di kawasan dan untuk melengkapi perjanjian keuangan internasional yang sudah ada. Pola kerja dari CMIM adalah menyediakan bantuan keuangan melalui transaksi *swap* (transaksi pertukaran dua valuta asing melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, atau penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka) mata uang antara para anggota dalam CMIM pada saat likuiditas dibutuhkan (Wire, 2010). Sejak Maret 2010 CMIM secara resmi telah berjalan menjadi rezim finansial satu-satunya dengan sistem likuiditas yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN Plus Three (APT). Bank Tiongkok dan Jepang menjadi kontributor terbesar dalam CMIM.

Tiongkok secara signifikan menjadi sangat pro aktif dalam upaya pembentukan integrasi finansial kawasan di mana sebelumnya Tiongkok menunjukkan ketidak tertarikannya terhadap segala bentuk kerjasama finansial yang bersifat multilateral. Sebelumnya Tiongkok pernah menolak usulan Jepang terkait pembentukan AMF yang merupakan sebuah badan finansial regional yang memungkinkan penanggulangan krisis dengan cara menyediakan bantuan likuiditas. Penolakan Tiongkok terhadap AMF dikarenakan kekhawatiran Tiongkok akan cadangan mata uangnya yang harus dipertaruhkan untuk negara-negara APT khususnya Asia Tenggara, namun dalam CMIM pun Tiongkok tetap harus mempertaruhkan cadangan mata uangnya karena bentuk CMIM dan AMF memiliki kesamaan yakni sebuah lembaga yang menyediakan sistem likuiditas yang berfungsi sebagai penyedia bantuan apabila terjadi krisis di masa mendatang

atau sebuah dana moneter Asia. Perubahan sikap Tiongkok ini mengindikasikan bahwa ada yang mendorong Tiongkok untuk merubah pemikirannya terhadap integrasi finansial kawasan. Faktor pendorong perubahan sikap Tiongkok inilah yang kemudian akan dibahas dalam jurnal ini.

Kebijakan Tiongkok Saat Terjadi Krisis Finansial

Tiongkok memiliki bank sentral yang bernama The People's Bank of China yang memiliki tugas untuk mengontrol moneter dan finansial Tiongkok. Namun karena Tiongkok merupakan sebuah negara yang menganut sistem sosialis komunis maka Gubernur bank ditunjuk oleh Partai Komunis Tiongkok lewat National People's Congress. Dalam hal ini partai komunis mengontrol Bank of China, menentukan nilai tukar Yuan, mengatur pemerintahan, dan mengatur politik moneter. Untuk penetapan *fixed exchange rate*, Bank of China menggunakan sistem *currency board* sendiri seperti yang dilakukan oleh Argentina pada tahun 1990-an. *Currency board* merupakan aturan dimana bank sentral memegang mata uang asing yang cukup untuk mendukung setiap unit mata uang domestik. Oleh karena itu pemerintah Tiongkok harus memiliki cadangan devisa yang kuat untuk mendukung sistem *fixed exchange rate* yang ditetapkan (Gregory 2007). Dengan menggunakan *currency board*, Tiongkok mampu untuk terus mematok dan mengontrol nilai Yuan terhadap Dollar AS sehingga seberapa banyak jumlah Dollar yang dicetak oleh Bank sentral AS untuk mendepresiasi nilai Dollar terhadap Yuan, nilai Dollar AS tetap akan lebih tinggi terhadap nilai Yuan. Dengan nilai tukar yang lebih rendah maka harga-harga produk Tiongkok yang akan diekspor keluar negeri menjadi lebih murah.

Penetapan *fixed exchange rate* Tiongkok telah menjadi isu politik ekonomi yang banyak diperbincangkan di Amerika, karena para produsen Amerika kesulitan untuk bersaing dengan produk-produk murah dari Tiongkok yang membanjiri pasar Amerika. Menanggapi hal ini Amerika menginginkan adanya penyesuaian jangka pendek dengan melakukan revaluasi Yuan sehingga ketidakseimbangan

neraca perdagangan dapat diatasi dengan cepat (Lardy 2005). Namun, bagi Tiongkok tidak mudah untuk melepas penentuan nilai tukar Yuan ke pasar karena akan membawa implikasi yang luas pada perekonomian Tiongkok. Oleh karena itu, hingga saat ini Tiongkok masih mempertahankan kebijakan ekonominya yaitu menetapkan *fixed exchange rate* dengan *currency board* sendiri.

Pada tahun 1990-an perkembangan ekonomi di kawasan Asia Timur-Tenggara mengalami kemajuan yang pesat dalam hal pembangunan ekonomi. Namun, kesuksesan ekonomi tersebut membuat negara-negara kawasan Asia Timur-Tenggara meremehkan kelemahan struktur ekonomi yang ada, hingga terjadilah krisis finansial Asia. Tiongkok tidak terpengaruh oleh krisis finansial Asia karena beberapa faktor, antara lain: renminbi tidak dapat ditukar dengan valas, hampir semua investasinya dalam bentuk *Foreign Direct Investment* (FDI) dan bukan bidang sekuritas. Meskipun Tiongkok memiliki masalah dalam kesanggupan melunasi utang atau *solvency* yang parah dalam sistem perbankannya, mayoritas dana yang tersimpan di bank-bank Tiongkok adalah berasal dari sumber domestik, sehingga tidak ada peristiwa pelarian dana ke luar negeri. Krisis ini merupakan momentum bagi Tiongkok untuk menunjukkan dirinya di kancah regional melalui berbagai kebijakan. Pada masa krisis tersebut, Tiongkok tidak banyak berperan, namun kebijakannya untuk tidak mendevaluasi renminbi (RMB) lebih jauh setelah sebelumnya sempat didevaluasi 30% tahun 1994, memberikan keringanan bagi sektor ekspor negara-negara yang terkena krisis. Hal ini dianggap sebagai dorongan bagi negara yang terkena krisis untuk lebih mudah keluar dari keterpurukan ekonomi (Rathus 2011).

Asia Tenggara memiliki signifikansi tersendiri bagi Tiongkok karena merupakan salah satu kawasan paling dinamis dan paling berkembang di dunia. Selain itu, Asia Tenggara menjadi kawasan yang cukup aktif dalam hal kerjasama dari integrasi dan regionalisasi sehingga Tiongkok memandang ASEAN sebagai mitra strategis dari sudut pandang ekonomi. Dengan ikut serta dalam kerangka

kerja yang dibuat oleh ASEAN, Tiongkok dapat memproyeksikan kepentingannya ke arah global dan regional (Dent 2008, 3). Kepentingan nasional Tiongkok secara umum masih fokus pada kesejahteraan ekonomi sehingga mendorong untuk mewujudkan lingkungan internasional yang dapat menguntungkan kepentingan ekonominya. Pencapaian kepentingan tersebut tidak dapat diraih hanya dengan sebuah keikutsertaan dalam sebuah kerangka kerja sama saja melainkan faktor kepemimpinan dan pengaruh dalam organisasi akan turut menentukan sejauh mana Tiongkok dapat mempengaruhi suatu proses pengambilan kebijakan. Sedangkan di kawasan Asia Timur, Jepang merupakan penghalang utama bagi Tiongkok karena kekuatan ekonomi Jepang merupakan saingan bagi Tiongkok. Oleh karena itu menahan dominasi Jepang di kawasan menjadi hal sangat penting karna potensi Jepang sebagai penghalang kebangkitan Tiongkok dalam hal ekonomi (Derek 2007, 66). Keikutsertaan Tiongkok dalam kerjasama finansial regional dapat menjadi suatu kesempatan bagi Tiongkok untuk memperkenalkan RMB yang juga berpotensi menjadi mata uang bersama di kawasan Asia Timur di masa depan (Haacke 2002).

Di sisi lain Tiongkok memiliki keterdekatan hubungan ekonomi khususnya perdagangan dan investasi dengan negara di kawasan Asia Timur-Tenggara. Ekonomi Tiongkok tidak hanya sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi regional melainkan juga sebagai pendorong terbentuknya integrasi ekonomi regional, sehingga Tiongkok harus mampu dalam mempertahankan dinamika pertumbuhan ekonominya tanpa jatuh ke dalam perangkap pendapatan menengah atau *middle income trap* (Wong 2012). Tiongkok merupakan integrator penting dalam perdagangan kawasan. Tiongkok mengimpor bahan mentah, suku cadang dan komponen, teknologi dan peralatan, serta jasa dari negara-negara Asia Timur-Tenggara, mengubah produk "*made in Asia*" menjadi produk "*made in China*" yang kemudian diekspor kembali ke seluruh negara di dunia. Dengan kata lain, Tiongkok tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi kawasan, melainkan juga membutuhkan

kestabilan finansial dan ekonomi kawasan agar perekonomian domestiknya tidak terganggu. Jika salah satu negara mengalami krisis finansial, inflasi, atau likuiditas jangka pendek maka akan berimbas pada kuantitas ekspor-impor Tiongkok (Wong 2012).

Kawasan Asia Timur-Tenggara merupakan kawasan penting bagi perdagangan Tiongkok dikarenakan kawasan ini selalu berada pada posisi pertama yang memberikan nilai ekspor dan impor terbesar dalam akumulatif nilai total ekspor-impor Tiongkok ke dan dari seluruh negara dunia. Apabila terjadi krisis finansial pasti akan melemahkan nilai tukar mata uang yang kemudian menurunkan daya beli dan impor negara-negara di kawasan Asia Timur-Tenggara yang pasti berpengaruh pada turunnya jumlah ekspor Tiongkok. Sedangkan, dari sisi impor, krisis finansial yang memengaruhi nilai tukar dan ekonomi negara Asia Timur-Tenggara akan mengakibatkan terhambatnya kegiatan ekspor. Hal ini akan berpengaruh pada proses industri Tiongkok karena untuk industrinya Tiongkok bergantung bahan mentah dan bahan bakar di negara Asia Tenggara khususnya. Jika industri Tiongkok terganggu maka juga akan merugikan perekonomian domestik Tiongkok. Menteri Keuangan Tiongkok dalam pertemuan para Menteri Keuangan negara-negara APT pada tanggal 3 Mei 2009 di Nusa Dua Bali Indonesia, menyatakan bahwa, Tiongkok sebagai negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia saat ini, benar-benar ingin agar negara di kawasan Asia Timur-Tenggara tetap mempertahankan keadaan ekonominya dan bagi Tiongkok adanya cara penanganan krisis CMIM merupakan langkah yang benar (Wibisono 2009). Perekonomian negara kawasan Asia Timur-Tenggara khususnya ASEAN bagi Tiongkok merupakan mitra penting dalam perdagangan dan investasi seperti yang disampaikan pada Oktober 2003 dalam KTT ASEAN oleh Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao, "Kami sepakat untuk mengembangkan lebih lanjut hubungan dan kemitraan ASEAN dengan Tiongkok guna memperkuat perdagangan dan investasi" (Suara Merdeka 2003).

Tiongkok adalah kekuatan stabilisasi diantara kekuatan ekonomi regional (Sing 2008). Dalam hal ini Tiongkok telah mempersiapkan dengan cara melakukan restrukturisasi industri domestik dan meningkatkan integrasi ekonomi ke dalam ranah dunia, akhirnya Tiongkok mulai berkembang menjadi sumber FDI, namun besarnya investasi Tiongkok ke negara-negara di kawasan tidak sebesar investasi yang diterima Tiongkok dari negara-negara tersebut. Jumlah FDI yang berasal dari negara-negara kawasan Asia Timur-Tenggara dalam kurun waktu tahun 1998 hingga tahun 2008 selalu berjumlah diatas 50% dari total FDI yang masuk ke Tiongkok (National Bureau of Statistics of China 2012). Hal ini berarti, jika terjadi krisis di negara kawasan Asia Timur-Tenggara, maka akan berpengaruh ke dalam jumlah FDI mereka ke Tiongkok yang kemudian berlanjut mempengaruhi rencana-rencana pembangunan dan pengembangan ekonomi dalam negeri Tiongkok. Disisi lain, peningkatan FDI juga merupakan salah satu mekanisme untuk menekan defisit perdagangan.

Proses Terbentuknya Chiang Mai Initiative Multilateralism dan Respon Tiongkok

Di akhir 1997 kawasan Asia Timur-Tenggara mengalami krisis ekonomi, Jepang mengusulkan mekanisme regional untuk stabilisasi finansial kawasan yang mandiri. *Asian Monetary Fund* (AMF) merupakan institusi finansial kawasan yang ditawarkan oleh Jepang untuk menangani permasalahan finansial akibat krisis. Meskipun AMF gagal dibuat, ide untuk membuat mekanisme pendukung likuiditas regional tidak pernah hilang. Akhirnya di tahun 2000 terbentuklah Institusi bernama *Chiang Mai Initiative* (CMI) dalam forum deputi keuangan ASEAN Plus Three (APT) di Thailand. CMI kemudian menjadi sebuah inisiatif yang terdiri dari *bilateral swap agreements* (BSAs) antara bank sentral dari negara-negara APT (Chey 2009). Selama dekade berikutnya Tiongkok melihat signifikansi perkembangan perekonomian kawasan baik dari segi sumber daya, perdagangan, dan pasar,

membuat Tiongkok merasa bahwa CMI saja tidak cukup namun perlu di multilateralisasi dan segala aturan-aturan yang ada dalam CMI diubah agar diatur dalam persetujuan kontrak tunggal, serta disertai dengan penambahan ketentuan dan aturan baru untuk lebih memperkuat kapasitasnya dalam menanggulangi krisis (Kawai 2010). Negara-negara di wilayah Asia Timur-Tenggara tersebut akhirnya menyetujui perubahan pada prinsip hubungan bilateral dalam skema CMI ke dalam cadangan multilateralisasi *self-managed pooling* yang diatur oleh satu perjanjian kontrak, atau inisiatif *Chiang Mai Multilateralism* (CMIM), dalam pertemuan menteri keuangan ASEAN+3 di Kyoto, Jepang pada bulan Mei 2007 (Sussangkarn 2010).

Satu tahun kemudian, pada pertemuan ke-11 Menteri Keuangan negara-negara ASEAN+3 di Madrid, Spanyol, disepakati bahwa jumlah keseluruhan cadangan yang akan di kumpulkan di kawasan Asia Timur-Tenggara paling tidak sebesar USD 80 juta dan bahwa 80% dari jumlah tersebut yang akan memberi kontribusi adalah negara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, kemudian selebihnya berasal dari kontribusi negara-negara ASEAN. Namun akhirnya kesepakatan terakhir adalah dana yang dikumpulkan sebesar USD 120 miliar tetap dengan kontribusi terbesar berasal dari tiga negara Asia Timur. Kesepakatan yang lebih substantif pada saat itu baru tercapai saat pertemuan ke-12 Menteri Keuangan ASEAN+3 di Bali, Indonesia pada 3 Mei 2009 (Joint Media Statement of the 12th ASEAN+3 Finance Ministers' Meeting 2009).

Krisis finansial global di tahun 2008 semakin menyadarkan negara APT akan pentingnya pertahanan finansial di tengah ketergantungan antar negara yang semakin meningkat karena apabila terjadi krisis di salah satu negara akan cepat berimbas pada negara lainnya. Meskipun krisis finansial global tidak terlalu berdampak buruk di kawasan Asia Timur-Tenggara, namun menjadi momentum bagi negara APT untuk membuat suatu

kesepakatan terkait fitur-fitur dasar dari pengaturan finansial baru dan meminta para deputi keuangan dari tiap negara untuk menyusun kontrak yang nantiya digunakan sebagai peraturan tertulis sehingga lebih teratur dalam penerapannya (Ciociari 2011). Namun yang membuat perjanjian CMIM lama direalisasikan adalah terkait perdebatan tentang sistem jumlah kontribusi. Contohnya, jika jumlah sumbangan atau kontribusi ini didasarkan pada jumlah cadangan asing maka negara yang mempunyai cadangan terbesar yaitu Tiongkok akan memiliki jumlah kontribusi paling besar. Jika didasarkan pada ukuran dari GDP per kapita, maka kemudian Jepang yang akan memberikan kontribusi terbesar. Korea Selatan, tentu saja, menduduki peringkat ketiga sedangkan negara ASEAN hanya akan berkontribusi dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa CMIM akan didominasi oleh Tiongkok ataupun Jepang, akhirnya diputuskan bahwa Tiongkok, termasuk kontribusi dari Hongkong SAR, Tiongkok, dan Jepang akan berkontribusi dalam jumlah yang sama, dan Korea Selatan akan berkontribusi setengah dari kontribusi Tiongkok-Jepang (Sussangkarn 2010).

Akhirnya, pada Maret 2010 perjanjian CMIM menghasilkan suatu pengaturan finansial yang baru untuk membantu krisis nilai tukar dan likuiditas di masa depan. Dalam CMIM bank sentral Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan 10 negara anggota ASEAN berkontribusi dengan total dana sebesar USD 120 Milyar yang digunakan sebagai fasilitas *multilateral swap*. Perubahan peraturan dan penambahan fasilitas baru yang terdapat dalam CMIM tidak membuat perjanjian ini berubah bentuk menjadi sebuah dana moneter, melainkan hanya merupakan kemajuan tambahan dari jaringan bilateral swap yang sudah ada sebelumnya dalam CMI sehingga dinamakan CMIM dikarenakan menggambarkan sebuah proses multilateralisasi dan bukan sebuah dana moneter atau institusi.

Negara-negara Asia Timur-Tenggara pada prinsipnya dihubungkan melalui pasar yaitu melalui perdagangan, arus keuangan, investasi langsung, dan bentuk-bentuk lain dari pertukaran ekonomi dan sosial. Krisis finansial Asia 1997-1998 adalah titik yang membuat kawasan ini memfokuskan perhatiannya terhadap kepentingan bersama. Krisis ini juga mengungkapkan kelemahan dalam arsitektur keuangan bahkan di banyak negara, krisis ini juga melibatkan krisis perbankan yang serius, runtuhnya pasar kredit, dan resesi yang dalam (ADB t.t.). Kawasan Asia Timur-Tenggara perlu memantau perkembangan ekonomi dan keuangan dengan cermat, dan harus siap untuk mengadopsi kebijakan yang terkoordinasi untuk mendukung perkembangan kawasan yang terus tumbuh. Oleh karena itu kawasan Asia Timur-Tenggara harus melakukan restrukturisasi dan memperkuat sistem keuangan mereka, di tingkat regional serta membentuk mekanisme bagi kerja sama dan pembiayaan darurat. Instabilitas finansial kawasan mau tidak mau akan mempengaruhi stabilitas perekonomian masing-masing negara. Krisis telah mendorong pembentukan *Chiang Mai Initiative Multilateralization* atau CMIM sebagai upaya kolektif menciptakan alternatif kerja sama finansial kawasan di luar IMF. CMIM dimaksudkan sebagai solusi mengatasi keterbatasan institusi finansial global yang tidak hanya gagal mencegah terjadinya krisis di kawasan dengan pengetatan fiskal yang menimbulkan efek traumatis, namun juga ketidakmampuan institusi tersebut melindungi kepentingan negara dengan sistem dan manajemen finansial yang masih berkembang dari dampak negatif liberalisasi finansial (ADB t.t.).

Arti Penting CMIM terhadap Kepentingan Nasional Tiongkok

Pertemuan antara negara-negara ASEAN dengan tiga mitranya Jepang, Tiongkok, Korea Selatan untuk pertama kalinya dilakukan pada Desember 1997 di Kuala Lumpur namun pada pertemuan ini belum bisa menghasilkan suatu keputusan yang signifikan.

Pertemuan kedua akhirnya dilaksanakan pada Desember 1998 di Hanoi, Vietnam, dan dalam pertemuan kali ini Tiongkok menyarankan agar diadakan forum rutin antar deputy keuangan dari negara APT untuk mendiskusikan isu-isu finansial (Hayashi 2006). Saran dari Tiongkok mulai menandai ada sedikit perubahan sikap Tiongkok dalam hal kerjasama finansial setelah sebelumnya tidak mendukung pembentukan *Asian Monetary Fund* (AMF) atau pun terlibat secara aktif dalam kerangka kerjasama regional pasca Perang Dingin. Pada Mei tahun 2000, APT membangun kerangka kerjasama finansial kawasan sebagai suatu upaya penanggulangan krisis yang diberi nama *Chiang Mai Initiative* (CMI) yang merupakan sekumpulan bilateral swap agreements (BSAs. Namun, seiring berjalannya waktu Tiongkok merasa bahwa jika kerangka tersebut hanya bersifat bilateral akan sulit untuk penanganan krisis yang kemudian, Tiongkok mulai mendorong pembentukan kerangka kerjasama yang lebih terintegrasi secara multilateral. Usaha Tiongkok akhirnya berhasil dan *Chiang Mai Initiative* dimultilateralisasi menjadi *Chiang Mai Initiatives Multilateralism* di tahun 2009 dan ditandatangani oleh seluruh negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, ditambah otoritas keuangan Hongkong Tiongkok dengan fungsi sebagai penyedia bantuan likuiditas mandiri bagi negara-negara anggota APT (Chey 2009). Sejak Maret 2010 CMIM secara resmi telah berjalan menjadi rezim finansial satu-satunya dengan sistem likuiditas yang telah disepakati oleh negara-negara APT. Bank Tiongkok dan Jepang menjadi kontributor terbesar dalam CMIM.

Sikap maupun keputusan yang diambil oleh sebuah negara merupakan refleksi dari tujuan dan kepentingannya. Kepentingan nasional merupakan tujuan akhir dari sebuah kebijakan, sehingga kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai kebutuhan negara yang bersifat penting yang kemudian mengarahkan para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan luar negerinya (Perwita dan Yani 2006). Kepentingan nasional Tiongkok yang secara umum masih berfokus pada aspek kesejahteraan atau kepentingan ekonomi memacu Tiongkok untuk mewujudkan

sebuah lingkungan internasional yang dapat menguntungkan kepentingan ekonominya. Adanya peningkatan yang signifikan dalam hal kekuatan ekonomi mendorong Tiongkok untuk secara lebih aktif mencari status sebagai negara adi daya. Tiongkok menginginkan agar pengaruhnya tetap ada di kawasan Asia Timur-Tenggara (Mcdougall 2007). Hal itulah yang menjadi tujuan kebijakan luar negeri Tiongkok selain juga untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam negerinya.

Tiongkok sangat berfokus pada perekonomiannya. Kepentingan nasional Tiongkok secara umum juga berfokus dalam kesejahteraan ekonomi. CMIM adalah sebuah kerjasama swap mata uang untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan neraca pembayaran dan likuiditas negara ketika sebuah negara tengah berada dalam kondisi krisis finansial. Krisis finansial Asia 1997-1998 dan krisis global 2008-2009 dijadikan pelajaran bagi Tiongkok yang memang sebelumnya hanya berfokus pada peningkatan ekonomi dan menjalin kerjasama maupun hubungan secara bilateral. Namun sejak terjadinya dua krisis finansial tersebut yang memberikan *contagion effect*, membuat Tiongkok menyadari bahwa kestabilan finansial domestik saja tidak cukup namun perlu juga memperhatikan kestabilan finansial negara-negara di sekitarnya. Dukungan yang diberikan Tiongkok terhadap CMIM merupakan refleksi dari kepentingan nasionalnya yaitu kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi domestik Tiongkok yang bertumpu pada ekspor tidak akan dapat terwujud apabila wilayah pasar Tiongkok yang sebagian besar berada di kawasan Asia Timur-Tenggara rentan mengalami krisis finansial. Dikarenakan apa yang ditawarkan oleh CMIM sejalan dengan kepentingan yang akan dicapai oleh Tiongkok, sehingga Tiongkok memberikan respon positif terhadap pembentukan CMIM.

Keputusan Tiongkok mendukung terbentuknya multilateralisasi CMI selain karena mempertimbangkan kepentingan nasional, kebijakan ekonomi, dan kebijakan terhadap kawasan, juga

dipengaruhi oleh konteks pengambilan keputusan di masa tersebut. Ada beberapa hal yang turut mendorong diambilnya keputusan tersebut, yakni faktor waktu, informasi, dan pola interaksi antara Tiongkok dan Jepang di kawasan Asia Tenggara. Dilihat dari setting waktu, Tiongkok sejak lama telah aktif ikut serta dalam pembahasan kerjasama finansial kawasan dimulai dari CMI hingga CMIM, bahkan turut memberikan ide. Partisipasi Tiongkok yang aktif semenjak tahun 1997 dalam mekanisme APT membuat Tiongkok memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami keadaan ekonomi dan perpolitikan kawasan di masa itu. Keterlibatan Tiongkok secara langsung di dalam mekanisme APT yang mewadahi CMIM membuat Tiongkok memiliki informasi yang cukup untuk mendorong pengambilan keputusan. Hal ini juga menjadi pembeda konteks Tiongkok pada masa pembentukan CMIM dengan proposal AMF. Tiongkok di masa proposal AMF tidak memiliki waktu yang cukup untuk menganalisis keadaan dan memproyeksikan kemungkinan di masa depan.

Peristiwa krisis finansial Asia di masa pengajuan proposal AMF membuat Tiongkok sibuk membendung pengaruh luar dan menguatkan perekonomian dalam negeri, sekalipun Tiongkok tidak mengalami dampak krisis yang sangat signifikan. Selain itu proposal AMF merupakan proposal yang dirancang keseluruhan oleh Jepang, sehingga Tiongkok juga memiliki rasa kecurigaan tinggi bahwa bisa saja aturan dan sistem di dalam AMF di desain untuk memperbesar pengaruh Jepang di kawasan Asia Timur-Tenggara. Faktor lain adalah Jepang menjadi determinan yang penting dalam pengambilan keputusan Tiongkok. Perpolitikan di Asia Timur yang melibatkan Tiongkok dan Jepang menggambarkan pola aksi-reaksi dalam dinamikanya. Jepang menjadi satu-satunya pesaing yang mungkin akan membayangkan kebangkitan Tiongkok di masa depan. Pengambilan keputusan oleh Tiongkok akan dipengaruhi oleh keputusan yang diambil Jepang sebelumnya, bahkan juga dipengaruhi oleh

perkiraan akan tindakan yang mungkin diambil Jepang di masa depan. sehingga dengan lebih banyak ikut serta dalam inisiatif atau pun kerjasama-kerjasama di kawasan, Tiongkok memiliki kesempatan untuk mengimbangi keuntungan relatif Jepang (Heng 2007, 51).

Namun alasan paling penting dibalik dukungan Tiongkok ke CMIM adalah karena Tiongkok melihat fungsi CMIM sebagai rezim untuk menanggulangi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas ketika terjadi krisis finansial, dapat mengakomodasi kepentingan Tiongkok untuk menjaga kestabilan finansial kawasan Asia Timur-Tenggara ketika krisis sedang terjadi agar tidak berdampak buruk pada perekonomian Tiongkok. Didukung oleh beberapa pernyataan dari para *decision maker* Tiongkok, salah satunya adalah Menteri Ekonomi Tiongkok dalam pertemuan para Menteri Keuangan negara-negara ASEAN, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan pada tanggal 3 Mei 2009 di Nusa Dua Bali Indonesia, Menteri Keuangan Tiongkok Xuren Xie menyatakan bahwa,

“Tiongkok sebagai negara dengan cadangan devisa terbesar di dunia saat ini, benar-benar ingin agar negara di kawasan Asia Timur-Tenggara tetap mempertahankan keadaan ekonominya dan bagi Tiongkok adanya cara penanganan krisis CMIM merupakan langkah yang benar”, (Wibisono 2009).

Perekonomian negara kawasan Asia Timur-Tenggara khususnya ASEAN bagi Tiongkok merupakan mitra penting dalam perdagangan dan investasi seperti yang disampaikan pada Oktober 2003 dalam KTT ASEAN oleh Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao,

“Kami sepakat untuk mengembangkan lebih lanjut hubungan dan kemitraan ASEAN dengan Tiongkok guna memperkuat perdagangan dan investasi,”
(Suara Merdeka 2003)”

Simpulan

Tiongkok mendukung terbentuknya Chiang Mai Initiatives Multilateralism karena Tiongkok melihat fungsi CMIM sebagai rezim yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan neraca pembayaran dan likuiditas ketika terjadi krisis finansial, dapat mengakomodasi kepentingan Tiongkok untuk menjaga kestabilan finansial kawasan Asia Timur-Tenggara ketika krisis sedang terjadi agar tidak berdampak buruk pada perekonomian Tiongkok. Karena keputusan Tiongkok untuk mendukung terbentuknya CMIM dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang hendak dikejar Tiongkok di kawasan Asia Timur-Tenggara khususnya. Ada dua hal utama yang menjadi fokus kepentingan Tiongkok, yakni kepentingan ekonomi dan perluasan pengaruh di kawasan Asia Timur-Tenggara. Kedua kepentingan ini memiliki titik persilangan dengan aktifitas Jepang di kawasan. Jepang sebagai satu-satunya kompetitor potensial bagi Tiongkok merupakan penghalang bagi kebangkitan ekonomi dan pengaruh Tiongkok. Kepentingan ekonomi Tiongkok terkait dengan usaha pewujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merupakan esensi dari politik luar negeri Tiongkok. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang terpusat pada aktivitas ekspor dan memiliki hubungan perdagangan yang erat di kawasan, maka sangat dibutuhkan stabilisasi finansial, karena apabila krisis terjadi maka akan turut mempengaruhi aktivitas ekonomi negara-negara di kawasan termasuk Tiongkok. Di sisi lain Tiongkok secara alami memerlukan pengaruh yang lebih luas untuk mempermudah perjalanannya dalam memenuhi kepentingan yang lain. Dalam hal perebutan pengaruh yang bermuara pada perebutan posisi pemimpin kawasan inilah persaingan antara Tiongkok dan Jepang yang tidak dapat terelakkan.

Selain dilandasi oleh kepentingan-kepentingan tersebut, keputusan Tiongkok untuk mendorong terbentuknya CMIM juga dipengaruhi oleh prediksi akan konsekuensi yang menguntungkan bagi Tiongkok kedepannya. Melalui dukungan dan keikutsertaan

dalam CMIM, Tiongkok dapat memanfaatkan CMIM sebagai batu loncatan dalam meraih kerjasama ekonomi pada tingkatan lainnya terutama perdagangan. Di samping itu, CMIM juga akan menjadi awal integrasi finansial yang lebih luas sehingga berpotensi untuk terbentuknya suatu sistem moneter regional yang bisa digunakan oleh Tiongkok untuk mengukuhkan mata uangnya Renminbi sebagai mata uang regional. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada stabilitas perdagangan internasional Tiongkok kedepannya. Melalui pemenuhan akan kepentingan-kepentingan tersebut, CMIM juga akan menjadi landasan terciptanya stabilisasi finansial kawasan sehingga Tiongkok dapat terus meningkatkan ekonominya sehingga dapat memiliki pengaruh kuat dalam hal ekonomi di kawasan, sekaligus sebagai media perbaikan citra Tiongkok di kawasan Asia Tenggara guna menghilangkan kesan ancaman yang melekat pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang fantastis. Keikutsertaan Tiongkok dalam CMIM juga merupakan suatu respon akan perimbangan keaktifan Jepang di kawasan Asia Timur-Tenggara.

Daftar Pustaka

- ADB, "KEBANGKITAN REGIONALISME ASIA," Kemitraan bagi Kemakmuran Bersama
- Anwar, Dewi Fortuna dalam Genewati Wuryandari, *Mencermati Kembali Enam Dekade Politik Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: LIPI, 2007).
- Asami, Tadahiyo, "Chiang Mai Initiative as the Foundation of Financial Stability", Maret 2005, diakses pada Juli 20, 2015 <http://www.aseansec.org/17905.pdf>.
- "Asean Investment Report 2008 dan 2009", diakses tanggal 22 April 2010, <http://www.aseansec.com>
- Asian Development Bank, *Kebangkitan Regionalisme Asia: Kemitraan dan Kemakmuran Bersama*, (Mandaluyong City, Phil.:Asian Development Bank, 2008).
- Badan Kebijakan Fiskal, 2014, *INTEGRASI CMIM dan AMRO: menuju Regional Financial Arrangement di kawasan ASEAN + 3*, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/m/edef-konten-view-mobile.asp?id=20141229104951108689214>
- Bank of Japan, "Joint Press Release Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) Comes Into Effect," Maret, 2010, diakses pada Juni 10, 2015, http://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2010/un1003e.htm/.
- Biro Humas Kemenkeu RI, "Berlakunya Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM)," *SIARAN PERS*, Maret 24, 2010, diakses pada Maret 23, 2015, http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/siaran_pers/cmim_ind.pdf.
- Brown, Chris dan Kirsten Ainley, *Understanding international relations* (3rd eds), (New York: Routledge, 2005).
- Chairavat, Olarn, "Towards a Regional Financing Arrangement in East Asia," *World Economy* 24, no 8 (Agustus 2001), 981-999.

- Cheng, Chwee Kuik, "Multilateralism in China's ASEAN Policy: Its Evolution, Characteristics, and Aspiration," *Contemporary Southeast Asia*, 27, no. 1 (April 2005): 102-122, <http://www.jstor.org/stable/25798722> (diakses November 10, 2014).
- Chey, Hyoung-kyu, "The Changing Political Dynamics of East Asian Financial Cooperation: The Chiang Mai Initiative," *Asian Survey* 49, no. 3 (Mei/Juni 2009): 450-467, <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2009.49.3.450> (diakses November 10, 2014).
- "China and the Global Financial Crisis: Implications for the United States," Morison, Wayne M. dan Marc Labonte, Congressional Research Service <http://fas.org/sgp/crs/row/RS22984.pdf>.
- Chongvilaivan, A., "Global Financial Crisis and growth prospects in Asia-Pacific: A sectoral analysis", (2010) *paper presented at The 26th Conference of the American Committee for Asian Economic Studies, Kyoto, Japan, 5-6 March*; Philip Davis "A typology of financial instability," *Oesterreichische National Bank Financial Stability Report 2*, (2001): 92-110.
- Ciociari, John D., "Chiang Mai Initiative Multilateralization," *Asian Survey* 51, No. 5 (September/Oktobre, 2011): 926-952, <http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2011.51.5.926> (diakses Januari 15, 2015).
- Dent, Christopher Marseille, *China, japan and regional leadership in east asia*. (Cheltenham: Edward Elgar, 2008).
- Dougherty, James K. dan Robert L. Pfaltzgraff Jr, *Contending Theories of International Relations*, (New York: Row Publisher, 1981).
- Farrel, Marry, "The Global Politics of Regionalism: An Introduction", dalam Marry Farrel dan Bjorn Hettne (eds), *Global Politics of Regionalism*, (London: Pluto Press, 2005).
- "G7 and China in a management of the international Financial System," John kirton, , diakses 22 Maret, 2013, <http://www.g8.utoronto.ca/scholar/kirton199903/china4.htm>.

- Gill, Indermit dan Homi Kharas, "Trade," dalam *An East Asia Renaissance Ideas for Economic Growth*, (Washington DC: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2007).
- Gilpin, Robert dan Jean Millis Gilpin, *The Challenge of Global Capitalism: The World Economy 21st Century*, (Princeton NJ: Princeton University Press, 2002) Gregory, Mankiw, N., *Macroeconomics* 6th edition, (New York: Worth Publisher, 2007).
- Haacke, Jurgeen, "Seeking Influence: China's Diplomacy Towards ASEAN after the Asian Crisis," *Asian Perspective* 26, no 4, (2002): 1-38.
- Haas, Ernst dan Leon N. Lindberg dalam James K. Dougherty dan Robert L. Pfaltzgraff Jr, *Contending Theories of International Relations*, (New York: Row Publisher, 1981).
- Haddad, Mona, "Trade Integration in East Asia: The Role of China and Production Network," *World Bank Policy Research Working Paper* 4160 (Maret 2007): 1-36, <http://econ.worldbank.org>. (diakses Maret 21, 2015).
- Hayashi, Shigeko, *Japan and East Asian monetary regionalism: Towards a proactive leadership role?* (New York: Routledge, 2006).
- Heng, Yee-Kuang, "Lost in translation? Why Japan and great power rivalry remain key to the international politics of east asia," *Irish Studies in International Affairs* 18, (2007).
- Herd, Richard & Dougherty, S. China's economy: A remarkable transformation. *Organisation for Economic Cooperation and Development*. (The OECD Observer, 2005).
- Hook, Glenn, Julie Gilson, Christopher Hughes, dan Hugo Dobson, "Japan and the east Asian financial crisis: Patterns, motivations and instrumentalisation of japanese regional economic diplomacy," *European Journal of East Asian Studies* 1, No. 2, (2002): 120-184.
- Ikbar, Yanuar, *Ekonomi Politik Internasional* 2, (Bandung: Refika

Aditama, 2007).

Jill, Rathus, *Japan, china and networked regionalism in East Asia* (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

Karunatileka, Eahan, "The Asian Economic Crisis", *Economics Policy and Statistics Section*, House of Commons Library (Februari 11, 1999), 1-15.

Kawai, Masahiro, "From the Chiang Mai Initiative to an Asian Monetary Fund," *paper presented at the Conference on the Future Global Reserve System*, Tokyo, 17-18 March 2010

Keohane, Robert O., "After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy," (United Kingdom: Princeton University Press, 1984).

Keohane, Robert O dan Joseph S Nye Jr, "Globalization: What's New? What's Not? (And So What?)" , *Foreign Policy* (2000).

Keohane, Robert O dan Joseph S Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, (Boston: Little, Brown and Company (Inc), 1977).

Kyu, Samuel C. Y., " China's Changing Political Economy with Southeast Asia: Starting A New Page of Accord," *Asian Perspective* 30, No. 4, Special Issue on "Rising China's Foreign Relations" (2006): 113-140, <http://www.jstor.org/stable/42704567> (diakses Juni 7, 2015).

Lamberte, Mario B, "An Overview of Economic Cooperation and Integration in Asia" dalam *Asian Development Bank, Asian Economic Cooperation and Integration: Progress, Prospects, and Challenges*, (Manila: Asian Development Bank, 2005).

Lardy, Nicholas, "Exchange rate and monetary policy in China", *Cato Journal*, (Januari 2005), <http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/2005/1/cj25n1-6.pdf>, (diakses Juni 1, 2015).

Lau, Lawrence J, "China's progress towards capital account con-

- vertability," *The Third Huang Lian Memorial Lecture*. Stanford (2003).
- Lipsky, Philip Y., "Japan's asian monetary fund proposal," *Stanford Journal of East Asian Affair*, (Spring 2003): 1-105.
- Lumbanan, David Tobing, "Kunci Keberhasilan Ekonomi China Pada Masa Pemerintahan Deng Xiaoping". *Jurnal Santika Gajah Mada* (2005).
- McDougall, Derek, *Asia pacific in world politics*, (London: Lynne Rienner, 2007).
- Oatley, Thomas, *International Politic Economi: Interest and Institution in The Global Economy*, (Pearson Education institute: Pearson Longmann, 2003).
- Paramitha, Luh, Sukma Sushanti, dan Putu Ratih Kumala Dewi, "Analisis Perubahan Kebijakan Luar Negeri Tiongkok Melalui Keikutsertaan Tiongkok dalam *Chiang Mai Initiative* sebagai Respon Terhadap Dominasi Jepang di Asia Tenggara," (Juli 2014): 1-14, <http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=195985>, (diakses Juli 25, 2015)
- Paul, A., & Van, D, "China, East Asia and the Global Economy: Regional and Historical Perspectives," *Journal of World History* (2009): 607-609.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yayan Mochamad Yani, *Pengantar hubungan internasional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).
- Philip Davis "A typology of financial instability," *Oesterreichische National Bank Financial Stability Report 2*, (2001): 92-110.
- Pomfret, Richard, "Regionalism in the Asia-Pacific Region: How Wide, How Deep?," *Journal of the Korean Economy* 10, no 3, (December 2009): 255-310.
- Prasetyantoko, Agustinus, *Bencana Finansial: Stabilitas sebagai Barang Publik*, (Jakarta: Buku Kompas, 2008).

- Rana, Pradumna B., "Monetary and Financial Cooperation in East Asia: The Chiang Mai Initiative and Beyond", *Asian Development Bank Working Paper Series*, No. 6, (Februari 2002) <http://www.hkcpec.org/files/f37.pdf> (diakses Juli 20, 2015).
- Ravenhill, John, *East Asian regionalism: Much ado about nothing?* (Canberra: Department of International Relations RSPAS College of Asia and the Pacific Australian National University, 2008).
- Rillo, Aladdin, "Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM): East Asia's Regional Liquidity Support," presentation to the Union of South American Nations (UNASUR) Finance Ministers' Meeting, Quito, Ecuador, (February 10, 2010), <http://www.bce.fin.ec/documentos/Eventos/Economicos/Aladdin%20Rillo%20ASEAN.pdf>, (diakses November 18, 2014).
- Rourke, John T., "International Economic Cooperation: the Alternative Road", dalam *International Politics on the World Stage*, tenth edition, (New York: Mc Graw hill, 2004).
- Rowley, Anthony, "Japan Hosts First of Regular Tripartite Summits," *Business Times Singapore*, (December 13, 2008).
- Sen, Gautam, "Post-Reform China and the International Economy: Economic Change and Liberalisation under Sovereign Control," *Economic and Political Weekly* 35, no. 11 (Maret 2000): 929-936, <http://www.jstor.org/stable/4409024> (diakses Juni 7, 2015).
- Shambaugh, David, "China's Military: Real or Paper Tiger?," *Washington Quarterly* 19, no. 1 (Spring, 1996): 1-36.
- Shaun Narine, "The Idea of An "Asian Monetary Fund": The Problems of Financial Institutionalism in the Asia-Pacific," *Asian Perspective* 27, no. 2, (2003):1-93.
- Shinohara, H., "On the Asian Monetary Fund." *Institute for International Monetary Affairs Newsletter* 4. (1999), dalam Pradumna Rana, Monetary and Financial Cooperation in East Asia, *Working Paper Series* No. 6, (Februari 2002) <http://www.hkcpec.org/files/f37.pdf> (diakses Juli 20, 2015).

Singh, Bhuhindar, "ASEAN's Perceptions of Japan: Change and Continuity," *Asian Survey* 42, No. 42, (2002), 1-295.

Sing, Lim Hua, *Japan & China in East Asean Integration*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008).

"Statistical Data-Annual Data 1998," National Bureau of Statistics of China, 2012, diakses Maret 10, 2015, <http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/YB1999e/q11e.htm>.

"Statistical Data-Annual Data 1999-2000," National Bureau of Statistics of China, 2012, diakses Maret 10, 2015, <http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/YB2001e/ml/indexE.htm>.

"Statistical Data-Annual Data 2001-2002," National Bureau of Statistics of China, 2012, diakses Maret 10, 2015, http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/yarbook2003_e.pdf.

"Statistical Data-Annual Data 2003-2004," National Bureau of Statistics of China, 2012, diakses Maret 10, 2015, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2005/indexeh.htm>.

"Statistical Data-Annual Data 2005-2006," National Bureau of Statistics of China, 2012, diakses Maret 10, 2015, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2007/indexeh.htm>.

"Statistical Data-Annual Data 2007-2008," National Bureau of Statistics of China, 2012, diakses Maret 10, 2015, <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2009/indexeh.htm>. International Whaling Commission. "Iceland and Commercial Whaling." <http://iwc.int/iceland>, diakses pada Selasa, 15 Januari 2013 pukul 21.40.

Suara Merdeka, "Deklarasikan Kemmitraan ASEAN-Tiongkok," *Suara Merdeka*, Oktober 9, 2003, diakses pada Maret 25, 2015, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0310/09/nas2.htm>.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*

tatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).

Sussangkarn, Chalongphob, "Note on Chiang Mai Initiative Multilateralization," *paper for a conference on Reforming the Global Monetary System*, Beijing, (Maret 18-19, 2001), http://policydialogue.org/files/events/Chalongphabs_Note.pdf, (diakses pada April 30, 2015).

Sussangkarn, Chalongphob, "The Chiang Mai Initiative Multilateralisation: Origin, Development and Outlook," *Thailand Development Research Institute*, (Februari 4, 2010): 8, Paper for presentation at a conference, Brussels, Belgium.

Synder, Craig A., *Contemporary security and Strategy*, (Macmillan: Palgrave, 2008).

Takashi, Kiuchi, "Future of ASEAN-Japan Financial Relation", *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asian Community*, (Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2003).

Taylor, Trevor, *Approaches and Theory in International Relations*, (New York: Longman Inc. 1978).

Wayne, Morrison, M. & Labonte, Marc, "China Holding of US securities : Implication for US Economy", *CRS Report for Congress*, (2009).

Wibisono, Kunto "Jepang Harap Ekonomi Kawasan Tercipta," *Antara News*, Mei 4, 2009, diakses pada Maret 25, 2015, <http://www.antaranews.com/berita/139842/jepang-harap-stabilitas-ekonomi-kawasan-tercipta>.

Winarno, Budi, *Isu-isu Global Kontemporer*. (Yogyakarta: CAPS, 2011).

Wire, PR, "Berlakunya Chiang Mai Initiative Multilateralism (CMIM)," *Antara News*, Maret 25, 2010, diakses pada Maret 23, 2015, <http://www.antaranews.com/berita/179450/berlakunya-chiang-mai-initiative-multilateralization-cmim>.

Wong, John, "A China-Centric Economic Order in East Asia," *Asia Pacific Business Review*, 19, no. 2 (November 2012): 286-296,

<http://dx.doi.org/10.1080/13602381.2012.739358> (diakses Januari 14, 2015).

Wu, Wang Gung dan John Wong, *Interpreting China's Development* (Singapore: East Asian Institute, National University of Singapore & World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd, 2007).

